

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi penting di semua negara, namun hal ini dapat menimbulkan ketimpangan distribusi pendapatan. Hubungan terkait pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan mulai mengemuka, ketika seorang ekonom bernama Simone Kuznets mengenalkan hipotesis U terbalik. Kuznets (1955) menyatakan ketimpangan ekonomi akan meningkat ketika proses pembangunan ekonomi tersebut mulai dilakukan hingga mencapai titik tertentu, kemudian akan berkurang ketika proses pembangunan ekonomi tersebut telah mencapai tahap kedewasaan sehingga mulai terjadi pemerataan. Hipotesis Kuznets ini menyatakan bahwa kesenjangan akan muncul sebagai akibat dari pertumbuhan yang kemudian akan menurun seiring dengan perkembangan pertumbuhan ekonomi tersebut.

Literatur awal yang mendukung hipotesis Kuznets diterbitkan pada tahun 1970-an, misalnya Paukert (1973) dan Ahluwalia (1976), mengkonfirmasi konsep hubungan berbentuk U terbalik antara ketimpangan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi. Studi selanjutnya didasarkan pada data *cross-sectional* dan panel yang lebih baik, dan mencakup periode sampel 1980-an oleh Ram (1989) dan Deininger dan Squire (1998) tidak menemukan bukti keberadaan kurva Kuznets. Bukti empiris terbaru pada tahun 2000-an oleh Kiatrungwilaikun dan Suriya (2015), tidak mendukung konsep tentang hubungan U terbalik antara ketimpangan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi.

Dalam kasus negara berkembang, pendapatan yang tinggi juga diikuti dengan meningkatnya ketimpangan pendapatan. Hal tersebut dikarenakan hanya segelintir individu atau kelompok yang memberikan pengaruh terhadap dispersi pendapatan. Namun, Anand dan Kanbur (1993) menjelaskan bahwa meningkatnya ketimpangan pendapatan seiring tumbuhnya perekonomian, akan menurun pada titik tertentu akibat terjadinya *trickle down effect*. Pertumbuhan itu sendiri menghasilkan peluang untuk mengangkat bagian bawah dari distribusi pendapatan. Persson dan Tabellini (1994) menyimpulkan bahwa, ketimpangan pendapatan berkorelasi terbalik dengan pertumbuhan ekonomi, tetapi hubungan itu hanya signifikan di negara berdemokrasi.

Indonesia sebagai negara berkembang yang telah menerapkan sistem demokrasi, sedang melakukan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan guna menghindari *Middle Income Trap (MIT)*. Terjadinya *commodity boom* pada tahun 2000-an memberi peluang tumbuhnya perekonomian Indonesia. Dampak dari fenomena ekonomi tersebut, menjadi alasan dalam proses pemulihan dan percepatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia (Wihardja, 2016). Puncak dari meningkatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia atas dampak *commodity boom* terjadi pada tahun 2011. Saat itu laju pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 6,5 persen. Namun, pada tahun 2011 juga merupakan akhir dari era *commodity boom*.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cepat kala itu, juga terjadi di seluruh provinsi. Peningkatan pertumbuhan ekonomi di level provinsi saat terjadi *commodity boom*, juga diikuti dengan tingkat ketimpangan yang tinggi (Yusuf dan Andy 2015).

Yusuf dan Andy (2015), serta Wihardja, (2016) juga menjelaskan pasca *commodity boom*, terjadi perlambatan ekonomi akibat turunnya harga-harga komoditas serta menurunnya laju pertumbuhan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) sehingga laju pertumbuhan di tiap provinsi di Indonesia menurun. Penurunan laju pertumbuhan di tiap provinsi tidak diikuti dengan menurunnya tingkat ketimpangan.

Menurunnya laju pertumbuhan terjadi disebabkan beberapa provinsi masih terfokus pada ekspor komoditas (mentah). Pada tahun 2014, ketimpangan pendapatan di beberapa provinsi masih terbilang tinggi, bahkan melebihi tingkat ketimpangan nasional. Menurut Yusuf dan Andy (2015), pasca *commodity boom* belum memberikan kontribusi secara luas di beberapa provinsi, *trickle down effect* yang diharapkan masih minim terealisasi. Selain itu, ketimpangan yang cukup tinggi juga membuktikan bahwa adanya *commodity boom* hanya dinikmati oleh provinsi-provinsi yang mempunyai fasilitas pendukung dalam memanfaatkan fenomena tersebut.

Pada tahun 2018, ketimpangan mulai menurun di hampir seluruh provinsi, serta diikuti dengan laju pertumbuhan yang mulai meningkat. Pemerintah mencoba memulihkan sektor perekonomian di bidang industri, termasuk dengan pembangunan infrastruktur di semua provinsi. Upaya-upaya tersebut, diharapkan mampu menggerakkan perekonomian yang sebelumnya terhambat.

Tabel 1.1
Indeks Gini dan Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi di Indonesia (pertumbuhan dalam persen)

Provinsi	Indeks Gini		Laju Pertumbuhan PDRB	
	2011	2018	2011	2018
Aceh	0,33	0,32	3,28	4,61
Sumatera Utara	0,31	0,31	6,66	5,18
Sumatera Barat	0,33	0,31	6,34	5,14
Riau	0,32	0,35	5,57	2,34
Jambi	0,35	0,34	7,86	4,71
Sumatera Selatan	0,40	0,34	6,36	6,04
Bengkulu	0,37	0,36	6,85	4,99
Lampung	0,32	0,33	6,56	5,25
Kep. Bangka Belitung	0,32	0,27	6,90	4,45
Kep. Riau	0,38	0,34	6,96	4,56
DKI Jakarta	0,40	0,39	6,73	6,17
Jawa Barat	0,38	0,41	6,50	5,64
Jawa Tengah	0,36	0,36	5,30	5,32
DI Yogyakarta	0,42	0,42	5,21	6,20
Jawa Timur	0,35	0,37	6,44	5,50
Banten	0,39	0,37	7,03	5,81
Bali	0,39	0,36	6,66	6,35
Nusa Tenggara Barat	0,37	0,39	-3,91	-4,56
Nusa Tenggara Timur	0,33	0,36	5,67	5,13
Kalimantan Barat	0,36	0,33	5,50	5,06
Kalimantan Tengah	0,33	0,34	7,01	5,64
Kalimantan Selatan	0,35	0,34	6,97	5,13
Kalimantan Timur	0,32	0,34	6,47	2,67
Kalimantan Utara	0,33	0,30	8,51	6,04
Sulawesi Utara	0,36	0,37	6,17	6,01
Sulawesi Tengah	0,39	0,32	9,82	6,30
Sulawesi Selatan	0,43	0,39	8,13	7,07
Sulawesi Tenggara	0,39	0,39	10,63	6,42
Gorontalo	0,40	0,42	7,71	6,51
Sulawesi Barat	0,37	0,37	10,73	6,23
Maluku	0,36	0,33	6,34	5,94
Maluku Utara	0,34	0,34	6,80	7,92
Papua Barat	0,37	0,39	3,64	6,24
Papua	0,38	0,40	-4,28	7,33

Sumber: BPS (2019)

Berdasarkan Tabel 1.1, di tahun 2011, lebih dari setengah seluruh provinsi di Indonesia memiliki laju pertumbuhan yang lebih besar bila dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 6,5 persen. Pada Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Papua yang memiliki laju pertumbuhan negatif, sedangkan Papua Barat dan Aceh yang hanya menyentuh angka tiga. Pada tahun 2018, hampir seluruh provinsi di Indonesia mengalami penurunan laju pertumbuhan ekonomi, dan hanya lima provinsi yang mengalami peningkatan, yaitu Aceh, DI Yogyakarta, Maluku Utara, dan Papua.

Laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada tahun 2011 juga memberikan dampak pada tingginya ketimpangan pendapatan (indikator indeks gini) di provinsi tersebut. Kalimantan Utara (Kaltara) dengan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi sebesar 8,18 persen, malah memiliki ketimpangan pendapatan yang cukup rendah sebesar 0,38. Berbeda halnya dengan Papua, dengan tingkat ketimpangan yang sama dengan Kaltara, laju pertumbuhannya negatif. Beralih pada ketimpangan pendapatan di tahun 2018, hampir setengah dari seluruh provinsi di Indonesia mengalami penurunan. DI Yogyakarta dan Gorontalo memiliki tingkat ketimpangan yang paling tinggi, keduanya sama-sama berada pada angka 0,42, sedangkan untuk ketimpangan terendah, terdapat di Provinsi Kaltara sebesar 0,30.

Perbedaan pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan antar provinsi di Indonesia, dapat dikarenakan perbedaan karakteristik wilayah pada masing-masing provinsi, dalam mendukung sektor-sektor perekonomian mereka.

Tabel 1.2
PDRB Sektoral per Kapita Provinsi di Indonesia (dalam juta rupiah)

Provinsi	2011			2018		
	Primer	Sekunder	Tersier	Primer	Sekunder	Tersier
Aceh	9,05	3,88	9,78	8,44	3,52	12,05
Sumatera Utara	7,13	8,75	10,83	9,30	11,23	15,05
Sumatera Barat	6,80	4,46	11,37	8,05	5,92	16,50
Riau	39,29	22,66	9,69	31,77	27,22	11,75
Jambi	16,42	5,38	9,06	20,21	7,23	12,62
Sumatera Selatan	11,57	8,08	7,52	13,93	11,03	10,71
Bengkulu	6,25	1,87	9,13	7,05	2,49	12,97
Lampung	8,35	5,40	6,99	9,64	7,96	10,14
Kep. Bangka Belitung	10,26	9,78	10,17	11,06	11,20	13,50
Kep. Riau	14,33	37,82	15,87	14,89	45,97	20,44
DKI Jakarta	0,44	32,87	84,36	0,41	42,19	123,26
Jawa Barat	2,67	11,47	7,84	2,61	15,25	11,30
Jawa Tengah	3,56	8,97	7,53	4,12	12,24	10,92
DI Yogyakarta	2,16	4,66	12,57	2,23	5,98	17,53
Jawa Timur	5,21	10,75	11,91	6,24	15,65	17,70
Banten	1,83	12,89	11,83	2,11	15,49	16,59
Bali	4,42	4,03	16,81	5,19	5,99	24,73
Nusa Tenggara Barat	6,64	2,08	5,99	6,82	2,73	8,47
Nusa Tenggara Timur	3,11	1,14	5,42	3,50	1,52	7,25
Kalimantan Barat	5,95	5,43	8,85	7,27	7,04	11,79
Kalimantan Tengah	10,60	6,14	9,84	13,00	8,59	13,97
Kalimantan Selatan	10,99	5,08	8,50	12,18	6,43	12,02
Kalimantan Timur	74,86	37,58	18,01	68,46	36,10	22,83
Kalimantan Utara	33,00	1,98	20,85	36,47	17,52	26,72
Sulawesi Utara	6,44	5,72	11,66	8,34	8,02	17,55
Sulawesi Tengah	9,88	3,42	7,80	14,85	8,25	11,33
Sulawesi Selatan	6,57	5,77	10,17	9,31	9,04	16,90
Sulawesi Tenggara	10,76	4,27	8,30	14,75	6,36	12,18
Gorontalo	6,19	2,53	6,97	8,73	3,43	10,38
Sulawesi Barat	7,16	2,70	6,17	9,48	4,40	9,11
Maluku	3,58	1,58	7,31	4,31	2,16	10,15
Maluku Utara	5,81	1,74	7,45	6,34	3,01	10,97
Papua Barat	20,14	22,74	11,66	18,77	28,58	17,14
Papua	21,32	3,96	11,10	25,68	6,09	16,31

Sumber: BPS diolah (2019)

Keterangan:

Primer : Pertanian dan pertambangan.

Sekunder : Industri, listrik, dan konstruksi.

Tersier : Perdagangan, pengangkutan, keuangan, dan jasa lainnya.

Berdasarkan Tabel 1.2, dari sembilan sektor yang diakui oleh *International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC)*, telah dikelompokkan lagi menjadi sektor primer, sekunder, dan tersier (Sukirno, 2006:143). Dari tabel tersebut, sektor primer tertinggi terdapat di Kalimantan Timur (Kaltim), lalu diikuti dengan Riau dan Kalimantan Utara, dan terendah dimiliki DKI Jakarta. Perbedaan kedua provinsi tersebut, dikarenakan Kaltim masih memiliki lahan yang luas dengan sumber daya alam yang melimpah (minyak bumi), sedangkan DKI Jakarta dengan lahan yang semakin sempit (industrialisasi), sudah tidak memungkinkan lagi untuk menunjang sektor primer.

Beralih ke sektor sekunder, pada sektor ini terdapat dua provinsi yang memiliki pendapatan per kapita yang tinggi, yaitu Kep. Riau dan DKI Jakarta. Kedua provinsi tersebut memiliki fasilitas pendukung yang memadai dalam menunjang sektor ini, apalagi DKI Jakarta sebagai pusat perekonomian di Indonesia dan Kep. Riau yang sedang diharap-harapkan oleh Kementerian Perindustrian, akan memiliki potensi besar dalam industri manufaktur.

Terakhir di sektor tersier, sektor ini memiliki Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita yang lebih tinggi dari sektor primer dan sekunder, baik di tahun 2011 maupun tahun 2018. Meskipun sektor tersier memiliki PDRB per kapita yang lebih tinggi, namun perbandingan di tiap provinsi tidak begitu jauh terkecuali DKI Jakarta.

Studi yang membahas terkait pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan di negara Indonesia dilakukan oleh Akita, Lukman, dan Yamada (1999),

dan hasilnya tidak menemukan korelasi yang signifikan secara statistik antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan. Sementara Tadjoeddin (2013), menemukan korelasi negatif yang signifikan secara statistik. Kemudian, penelitian selanjutnya yang lebih spesifik dengan melihat sektor pada pertumbuhan ekonomi dilakukan oleh Akita, Kurniawan, dan Miyata (2011), dan Bhattacharyya dan Resosudarmo (2015), hanya menemukan hubungan positif dan signifikan secara statistik antara PDB pertambangan dan ketimpangan, tanpa korelasi yang signifikan untuk PDB non-pertambangan.

Penelitian ini mengacu pada studi yang dilakukan oleh Gordón dan Resosudarmo (2019). Penelitian tersebut menunjukkan dampak positif dan signifikan secara statistik dari bagian manufaktur dan jasa dari *GDP* kab/kota terhadap ketimpangan pendapatan. Namun, porsi pertanian dalam *GDP* kab/kota menunjukkan dampak negatif terhadap ketimpangan pendapatan, sementara tidak ada dampak yang ditunjukkan untuk bagian pertambangan dari *GDP* kab/kota.

Berdasarkan pada studi empiris sebelumnya, maka peneliti akan mencari tahu pengaruh perekonomian daerah (PDRB) pada level sektor (primer, sekunder, dan tersier), terhadap ketimpangan pendapatan di provinsi-provinsi di Indonesia selama periode 2011-2018.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan dalam bagian latar belakang, maka rumusan masalah yang telah disusun dalam penelitian ini adalah:

Bagaimanakah pengaruh dari pertumbuhan PDRB sektoral, terhadap ketimpangan pendapatan di provinsi-provinsi di Indonesia selama periode 2011-2018?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah: Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh dari pertumbuhan PDRB sektoral, terhadap ketimpangan pendapatan di provinsi-provinsi di Indonesia selama periode 2011-2018.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk:

- 1) Pemerintah, sebagai salah satu bahan referensi dalam menetapkan sebuah kebijakan terkait dalam meningkatkan sektor-sektor yang memberikan kesejahteraan merata bagi masyarakatnya.
- 2) Masyarakat umum, sebagai referensi mereka untuk mengetahui sektor-sektor yang menjadi fokus pemerintah dalam menumbuhkan ekonomi nasional.
- 3) Dunia pendidikan, penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan referensi dan pembandingan studi/penelitian yang terkait dengan riset ini.

1.5 Sistematika Penulisan

Penelitian ini terbagi dalam 5 (lima) bab, masing-masing bab terdiri dari beberapa sub-bab. Penyusunannya dilakukan secara sistematis sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, hipotesis, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas tentang teori dan studi terkait.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini membahas tentang lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, metode analisis data, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini membahas tentang kesimpulan dan saran.